

Garuda (Gerakan Membangun Nusantara): Platform Optimalisasi Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Rangka Mendukung *Collaborative Governance*

***Aldyansah Satria Utama, Elshaddai Hosanna Prasetyo, Toriqul Mujahidi Ashshobrul Karim**

*Universitas Brawijaya, Indonesia; aldyansahsatria@gmail.com

Received: October 21, 2021; In Revised: January 26, 2022; Accepted: March 24, 2022

Abstract

Indonesia is a country that has the fourth largest population in the world. According to data (kemendagri.com, 2021), it is recorded that Indonesia's population in 2020 is 272 million people and will continue to increase, especially with the prediction of a population spike (demographic bonus) in 2045. This increasingly massive population increase is feared to cause problems in more diverse countries in the years to come. In the process of solving problems, of course, it requires multi-sectoral roles from various parties, including the community. This research will explain the importance of collaboration and strengthening of NGOs/NGOs as a form of community participation that will be shaded by the concept of collaborative governance. This type of research is descriptive research using a qualitative approach related to the phenomenon raised. Based on the urgency of the problems that have been summarized from this research, it is found the urgency of the need for an applicative solution. The innovation is the GARUDAApp which is a manifestation of the principles of collaborative governance that is here to help answer various challenges in society that might occur in 2045 and in the years to come

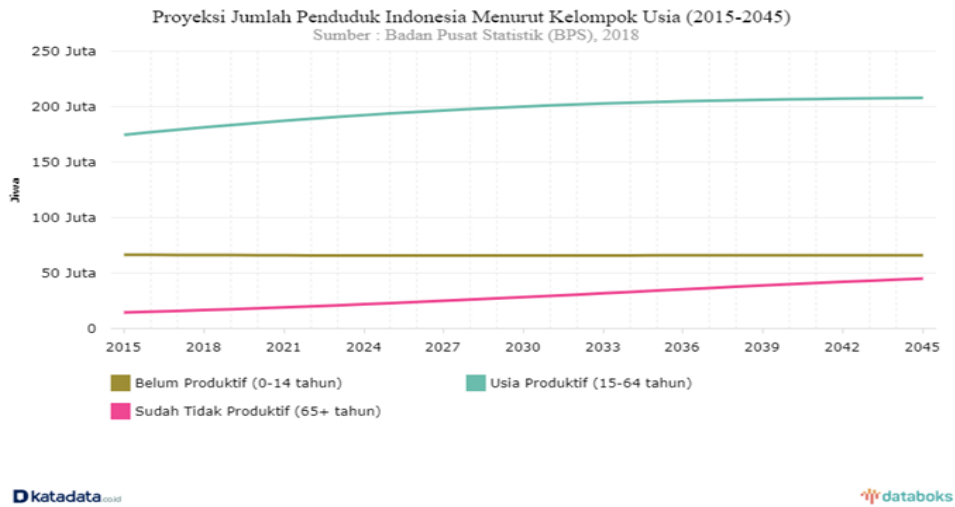
Keywords: Collaborative Governance, NGO, Community Digitization, GARUDA

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara subkultural dengan beragam kekayaan di dalamnya, salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia adalah dengan jumlah penduduk yang saat ini menempati posisi keempat terbanyak di dunia. Penduduk Indonesia sendiri yang berhasil tercatat menurut (kemendagri.com, 2021) yaitu lebih dari 272 juta jiwa. Angka ini akan diprediksikan mengalami lonjakan seiring dengan pergerakan Indonesia yang akan mencapai usianya ke 100 tahun pada 2045 mendatang. Tahun 2045 sejatinya merupakan salah satu tahun yang cukup dinanti karena seringkali dikumandangkan dengan slogan Indonesia Emas, namun sekaligus menjadi salah satu tahun yang dapat menjadi momok menakutkan bagi negara ini apabila tidak dipersiapkan dengan matang lantaran adanya fenomena bonus demografi. Bonus demografi, sendiri menurut (Sutikno, 2020) adalah suatu fenomena yang ditemukan dalam proses kependudukan di suatu negara karena adanya ledakan penduduk yang berada pada usia produktif. Hal ini diperjelas dengan salah satu diagram dibawah ini yang menunjukkan perbandingan yang kemungkinan besar akan terjadi di tahun 2045.

Gambar 1

Proyeksi jumlah penduduk indonesia menurut kelompok usia



Sumber: katadata.com, 2021

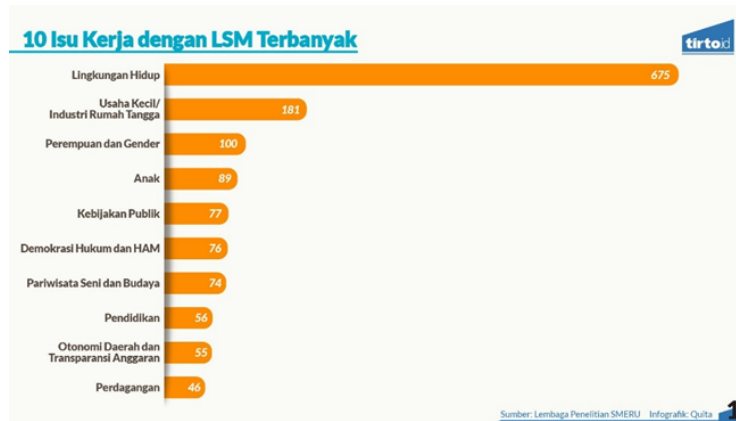
Seperti yang diketahui pula bahwa dengan seiring banyaknya penduduk di suatu negara, maka tanggung jawab negara untuk mengatur dan mengelola masyarakatnya juga semakin besar. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana negara harus mampu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Jika ditinjau dari aspek normatif maka, kewajiban negara dalam mengatur kebutuhan masyarakat tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 yang secara eksplisit berbicara terkait kesejahteraan sosial dan bagaimana peran negara untuk mampu melindungi warganya dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada. Beberapa contoh permasalahan sistemik yang kemungkinan akan terjadi pada tahun 2045 adalah terkait dengan pengelolaan perekonomian nasional, dimana hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara langsung (kemenkeu.go.id, 2020), serta contoh permasalahan lainnya adalah bagaimana keterlibatan Pemerintah dalam mengelola lingkungan, menurut (ditjenppi.go.id, 2021) bahwa pada tahun 2045, para ahli telah mengatakan bahwa Indonesia harus secara signifikan berperan aktif dalam upaya penurunan gas emisi karbon sebagai upaya pelestarian lingkungan global secara masif.

Menilik sedikit lebih lanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian permasalahan dalam suatu negara tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat yang bergerak secara koheren. Partisipasi masyarakat ini bergerak dalam bentuk yang semakin beragam salah satunya dengan adanya inisiasi mandiri untuk membangun lembaga swadaya masyarakat. Dilihat dari kajian normatif sendiri, Pemerintah sejatinya merancang peraturan khusus membahas terkait dengan organisasi kemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2013 yang secara eksplisit berbicara mengenai organisasi masyarakat merupakan organisasi yang sukarela dan terbuka serta melibatkan masyarakat sebagai subjek utamanya dalam mengelola dan memberikan dampak bagi sesamanya. Melihat dari cakupan permasalahan yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2045, LSM sejatinya dapat turut menjadi salah satu sektor yang akan menjadi tulang punggung dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia serta membantu Pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat dengan lebih baik. Berkaca dari rasa saling menolong antar masyarakat Indonesia yang selama ini menurut fakta di lapangan sudah cukup baik, maka LSM/NGO ini dapat menjadi komunitas tanggap yang memiliki pengaruh sosial cukup besar untuk menghimpun kekuatan masyarakat

agar mampu menolong sesama mereka. Berikut ini merupakan sejumlah data yang dihimpun dari (tirto.id, 2017) menunjukkan pokok kerja yang menjadi konsentrasi sejumlah LSM/NGO dalam beberapa tahun ini.

Gambar 2

10 Isu kerja dengan LSM terbanyak



Sumber : Tirto.id, 2021

Namun, mirisnya menurut studi yang dikemukakan oleh (A.Lassa, 2020) terdapat beberapa fakta ironi terkait keberadaan dari LSM ini di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini terjadi karena sektor ini seringkali terpinggirkan dan kurang memiliki prioritas penuh di depan hukum dalam keterlibatan pembuatan kebijakan. Data di lapangan menunjukkan bahwa sangat sedikit kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah dan bahkan Nasional mengembangkan serta secara aktif mengimplementasikan kebijakan yang mendukung dan berdampak pada sektor LSM. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa seringkali LSM/NGO baik di daerah maupun nasional cenderung bergerak secara mandiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Hal ini sejatinya sangat disayangkan karena apabila para pengelola LSM/NGO ini mau untuk berkolaborasi bersama dengan satu sama lainnya serta dengan berbagai pihak tentu dampak yang dihasilkan juga lebih optimal dan potensi keterjangkauan dampak yang ingin diberikan juga lebih besar.

Permasalahan seperti ini juga terjadi seperti di salah satu daerah di Jawa Timur lebih tepatnya yaitu Lamongan yang diperoleh melalui (lamongankab.go.id, 2020) pada data dari Bakesbangpol yang menyebutkan bahwa sejatinya pada tahun 2020, Lamongan memiliki 421 LSM yang tercatat serta terdaftar. Layaknya lembaga swadaya masyarakat pada umumnya, berikut akan disajikan sejumlah ilustrasi permasalahan sistemik yang dialami oleh LSM di Lamongan ini seperti yang diwakilkan oleh LSM Cakrawala Keadilan yang pada tahun 2019 kemarin sempat melakukan aksi bersih pantai di Desa Paciran, Lamongan. Kondisi yang cukup memprihatinkan bahwa menurut laporan yang dihimpun dari (Ronasifah, 2019) yang mendapatkan data bahwa selama kegiatan berlangsung masih ditemukan hambatan dari partisipasi masyarakat serta pihak lain untuk ikut terlibat. Padahal jika dilihat dari visi misi lembaga swadaya masyarakat cakrawala keadilan ini yang berfokus pada upaya pelestarian lingkungan daerah setempat yang dalam hal ini merupakan salah satu permasalahan kompleks yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk perlahan mengentaskannya. Gambaran permasalahan masih rendahnya partisipasi dari berbagai pihak seperti ini tentu menjadi salah satu ilustrasi dari permasalahan yang dialami oleh LSM di Indonesia seiring dengan permasalahan finansial, legitimasi dan permasalahan lainnya.

Meninjau dari sejumlah urgensitas yang ada dalam pengembangan LSM, masih minimnya kolaborasi antara berbagai pihak serta masih kurangnya partisipasi dari Pemerintah. Maka kami merancang inovasi yang dimana dapat menjadi wadah yang akan membantu proses pengintegrasian dengan sesama LSM serta pihak lainnya dalam kerangka *collaborative governance*, mempercepat alur penyampaian informasi kepada masyarakat luas apabila terjadi suatu peristiwa yang berdampak secara massif serta hal terpenting lainnya adalah agar para LSM/NGO ini mengetahui dengan pasti sejumlah dasar hukum yang berkaitan dengan visi misi komunitas yang mereka miliki selama ini. Inovasi ini akan dikemas dalam bentuk aplikasi dengan mempertimbangkan dari pengetahuan akan perkembangan teknologi di masyarakat yang semakin bergerak ke arah yang lebih positif ditandai dengan yang semula menurut (katadata.com, 2017) pembangunan TIK di Indonesia masih tergolong tertinggal di tingkat Asia Tenggara (ASEAN) karena tercatat pada tahun 2016, Indonesia masih menempati posisi 111 dari 176 negara dengan indeks 4,33 (menggunakan skala 0-10) kini pada tahun 2021 bergerak menjadi 5,59 (katadata.com, Indeks Pembangunan TIK Indonesia Naik Jadi 5,59 pada 2020 , 2021). Hal ini yang semakin mendorong terciptanya inovasi GARUDA (Gerakan Membantu Nusantara): Platform Optimalisasi Kolaborasi antar Stakeholders dalam Rangka Mendukung Collaborative Governance

Metode Penelitian

Metode Penelitian menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2016:9) adalah penelitian yang menempatkan peneliti sebagai pihak kunci (instrument penting) dalam pengumpulan data dan dilakukan dengan menggunakan metode gabungan (triangulasi), adanya analisis yang berbentuk induktif/kualitatif, penelitian ini sendiri merupakan pengejawantahan dari nilai yang terkandung dalam filsafat potpotivisme yang seringkali digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah. Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode ini umumnya lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif sendiri dijelaskan dengan lebih rigid melalui pengertian definisi dari (Namawi, 2002:63) merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Fokus penelitian yang terkandung pada karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menentukan batasan sejauh mana peneliti akan mengambil dan memanfaatkan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah kolaborasi multisektor dalam penguatan LSM/NGO. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan observasi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan instrumen vital yang menjadi bahan utama dari terselenggaranya penelitian ini. Jenis data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder yang meliputi arsip, dokumen, foto, jurnal serta penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka (library research) menganalisis, dan mencatat. Adapun langkah pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan acuan dari Rafiek (2013) yakni membaca literatur terkait, menguasai teori, menguasai metode, mencari dan menemukan data, menganalisis data yang ditemukan secara mendalam, mengkaji dan memilah data, dan membuat simpulan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan mencari pola, teori dan model, yaitu dengan menganalisis langsung data-data dari sumber yang mendukung dengan mengacu pada proses yang diungkapkan oleh Muchtar (2013:135) yaitu a) *Data reduction*, penulis memilah data yang akan dianalisis berupa kata, data, dan kalimat yang mendukung; b) *Data display*, penulis menampilkan data yang telah dipilah; dan c) *Verification*, penulis menyampaikan data yang diperoleh dan menuangkan dalam penelitian ini serta menganalisisnya menggunakan sejumlah teori yang telah disepakati kemudian membandingkan antara teori dengan realita yang terjadi di lapangan saat ini.

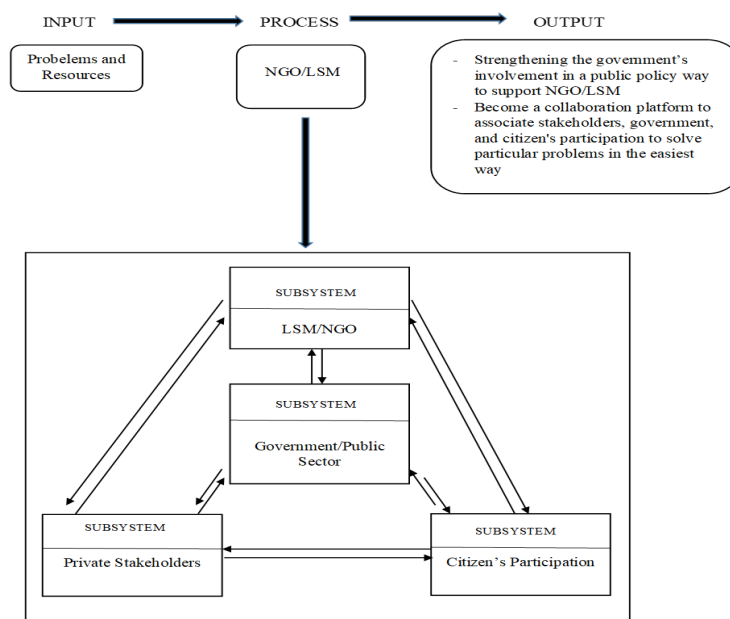
Hasil dan Pembahasan

Upaya Dukungan *Stakeholders* Berdasarkan Prinsip *Collaborative Governance* di Kabupaten Lamongan

Pengertian *Collaborative Governance* secara konseptual memiliki arti bahwa adanya kolaborasi antar multisektor yang disini hanya terdiri dari tiga pihak yang memiliki kesamaan visi misi dan tujuan bersama yang ingin dicapai (Selsky & Parker dalam Dwiyanto, 2011: 289) yang tertuang dalam (Putri, 2021). *Collaborative governance* sendiri terdiri dari tiga sektor yang terdiri dari sektor publik (Pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat serta institusi publik lainnya), sektor swasta yang dapat terdiri dari perusahaan *corporate* yang memiliki hubungan baik secara moril dan nonmoril, serta bagian dari masyarakat yang terdiri dari kelompok usaha lokal yang dapat turut serta dalam membantu proses pendanaan seperti dari masyarakat (*civil society*) yang secara kolektif membangun kegiatan/gerakan sosial yang berfokus pada salah satu isu. Ketiga pihak inilah yang nantinya akan bekerja sama untuk menghasilkan suatu penyelesaian masalah yang mampu untuk menjawab tantangan yang akan datang. Sebelum melakukan kerja sama tentunya masing-masing pihak perlu untuk saling mengakui legitimasi dan mengetahui tanggung jawab dari masing-masing pihak secara transparan untuk meminimalisir adanya permasalahan di kemudian hari. Korelasi multisektor antara ketiga pihak ini dapat dirangkum dalam narasi berikut ini:

Gambar 3

Skema proses kolaborasi multisektor



Sumber: Olahan Penulis (2021)

Pada gambar 4 di atas menjelaskan terkait keterkaitan antar masing-masing pihak yang lebih lanjut akan dijelaskan melalui kerangka *collaboratin transform process* menurut Shergolds (2008) yang terdiri dari *Command* (pihak yang memiliki otoritas lebih dan memiliki struktur hierarki yang jelas dalam memberikan komando formal), *Coordination* (pihak dimana penentuan keputusan bersama terjadi yang melibatkan berbagai pihak, umumnya hal ini akan dimulai oleh salah satu yang melakukan inisiatif aktif), *Cooperation* (pihak yang saling memberikan ide dan sumber daya bersama dengan berbagi keuntungan bersama yang akan dipenuhi dari perjanjian tersebut), *Collaboration* (pihak yang akan menggabungkan dan merealisasikan kolaborasi yang telah dirancang dalam suatu kerangka kerja sama yang telah disepakati untuk menyelesaikan suatu permasalahan strategis. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

Tabel 1
Posisi *stakeholders* terkait

No	Nama Stakeholders	Posisi
1	Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Pusat	<i>Command, Coordination</i>
2	LSM / Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lamongan	<i>Collaboration</i>
3	Badan Swasta di Kabupaten Lamongan	<i>Cooperation</i>

Sumber : Olahan Penulis (2021)

Berdasarkan tabel di atas, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan bersama dengan pemerintah pusat memiliki tanggungjawab dalam menjadi *leading sector* untuk mengkoordinir *stakeholder* lainnya yang diwujudkan dalam bentuk perumusan kebijakan terkait pengoptimalan peran LSM/NGO. Masyarakat dan LSM di Kabupaten Lamongan berperan sebagai pihak *collaboration* yang menjadi pihak utama dalam merangsang terwujudnya program-program kerja yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Badan Swasta di Kabupaten Lamongan berperan aktif sebagai *cooperation* yang memiliki tanggungjawab dalam membantu merealisasikan program kerja yang telah disepakati bersama LSM dan masyarakat terkait bantuan finansial, koneksi, fasilitas, dan lain sebagainya.

GARUDA atau singkatan dari Gerakan Membantu Nusantara merupakan sebuah platform yang mengintegrasikan pemerintah, *Non-Governmental Organization* atau NGO, dan Badan Swasta dalam mendukung upaya pembangunan sosial. Dibuatnya platform GARUDA, diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan kompleks dan memudahkan ketiga *stakeholder* tersebut dalam mengoptimalkan perannya masing-masing yang berlandaskan prinsip *collaborative governance*. Aplikasi GARUDA hadir dengan fitur-fitur yang mudah untuk digunakan bagi setiap pengguna baik dari kalangan umum hingga level NGO. Berikut ini merupakan hasil dari perancangan aplikasi yang akan dibuat.

Logo ini berbentuk huruf E yang melambangkan kata elektronik yang berarti inovasi ini berbentuk aplikasi. Filosofi burung garuda melambangkan kekuatan mutlak yang diharapkan dapat menjadi prinsip utama dalam *platfrom* ini yaitu, kekuatan yang dihasilkan atas kerja sama antar pemerintah, masyarakat, dan badan swasta.

Gambar 4
Logo aplikasi GARUDA



Sumber: Olahan penulis (2021)

Splash screen merupakan tampilan yang akan muncul pada saat aplikasi baru pertama kali dijalankan, tampilan *splash screen* pada perangkat lunak ini menggunakan warna background berwarna abu-abu yang berada dibagian atas aplikasi, dan menggunakan logo aplikasi yang berada pada bagian tengah. Tampilan *splash screen* dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.

Gambar 5
Tampilan splash screen



Sumber: Olahan penulis (2021)

Menu *get started* merupakan menu tampilan awal untuk memulai Aplikasi. Menu ini nantinya akan memberikan pilihan kepada *user* atau pengguna untuk Login sebagai publik atau pengelola. Publik dalam hal ini merupakan masyarakat. Masyarakat sebagai *user* tidak perlu mendaftar dan akan langsung diarahkan pada menu home. Sedangkan NGO selaku pengelola harus mendaftar serta diverifikasi oleh admin terlebih dahulu. Tampilan menu *getstarted* dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini.

Gambar 6
Tampilan *Getstarted*



Sumber: Olahan penulis (2021)

Menu Registrasi Pengelola berupa menu untuk masuk ke aplikasi dengan menginput *username* dan *password* yang sudah terdaftar sebelumnya. Namun jika User belum pernah terdaftar, maka mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Tampilan menu Registrasi pengelola dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini:

Gambar 7
Tampilan menu *registrasi*



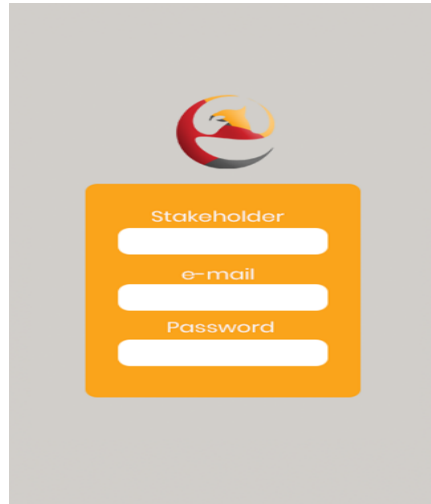
Sumber : Olahan penulis 2021

Setelah *user* memiliki akun untuk daftar, maka pengguna akan diarahkan pada bagian ini. Di bagian ini calon *user* sebagai pengelola diharuskan untuk mengisi nama *stakeholder* baik itu NGO maupun pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengisian alamat e-

mail dan *password* yang akan digunakan. Setelah itu, admin akan mengirimkan kode unik dan kode verifikasi pada alamat e-mail yang digunakan. Kode unik digunakan untuk mendaftar masuk sebagai pengelola, sedangkan kode verifikasi digunakan untuk menggunakan fitur forum komunikasi (*forkum*) antar NGO maupun dengan masyarakat. Tampilan menu registrasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 8

Tampilan menu *registrasi* pengelola bagian 2

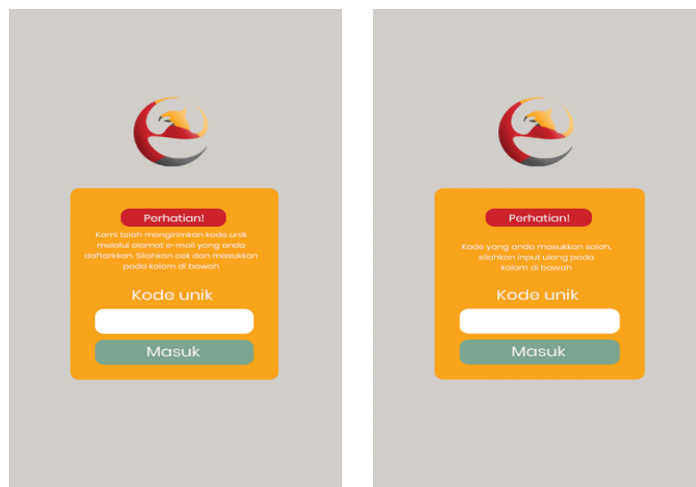


Sumber: Olahan penulis (2021)

Ketika sudah melewati proses pendaftaran, admin akan memberikan kode unik dan kode verifikasi pada alamat e-mail yang digunakan. *User* dapat menginput kode unik, pada kolom kode unik, selanjutnya menekan tombol masuk. Kode unik ini berfungsi sebagai pengaman agar penggunaan GARUDA App khususnya *user* pengelola tidak disalahgunakan. Jika kode yang diinputkan salah, maka sistem akan memberikan pemberitahuan untuk menginput kode hingga benar.

Gambar 9

Tampilan Penginputan Kode Unik



Sumber: Olahan penulis (2021)

Menu home adalah tampilan ketika *user*, baik publik maupun pengelola berhasil login dalam aplikasi. Menu *home* akan memberikan gambaran tentang berbagai fitur yang akan digunakan oleh user. Secara singkat, dalam menu *home* terdapat fitur *search* untuk mencari kata kunci yang berhubungan dengan NGO, berita terkini, klaster isu, maupun persebaran NGO yang ada di Lamongan. Selain itu, pada menu home terdapat satu fitur yang hanya bisa diakses oleh pengelola. Fitur tersebut adalah fitur forum komunikasi antar NGO. *User* yang *login* sebagai publik tidak akan bisa membuka halaman fitur ini.

Gambar 10
Tampilan menu *home*



Sumber: Olahan penulis (2021)

Fitur ini menampilkan persebaran NGO di wilayah Lamongan. Dalam fitur ini juga akan ditunjukkan mitra kerja atau NGO yang telah bergabung dalam GARUDA App guna turut ikut serta aktif dalam menyukkseskan pembangunan sosial di Indonesia. Dalam fitur ini terdapat juga list atau daftar NGO untuk mempermudah *user* dalam mengetahui nama sekaligus lokasi NGO terkait. *User* dapat menggunakan opsi *zoom in* dan *zoom out* untuk memperkecil ataupun memperbesar peta persebaran NGO di Lamongan maupun mitra NGO

Gambar 11
Tampilan fitur peta persebaran NGO



Sumber: Olahan penulis (2021)

Fitur Forkum atau forum komunikasi adalah fitur yang memberikan kesempatan bagi pengelola untuk bertukar pikiran antar NGO maupun dengan masyarakat. Ketika mendaftar sebagai pengelola dan berhasil masuk, maka admin akan mengirimkan kode unik dan kode verifikasi baik kepada masyarakat maupun NGO terkait. Kode verifikasi ini digunakan untuk memasuki grup forum komunikasi, sesuai jenis NGO dari pengelola agar bisa menggunakan fitur Forkum dengan maksimal. Kode verifikasi ini akan berbeda menyesuaikan dengan jenis NGO masing-masing. Ketika sudah berhasil, maka user (pengelola) akan ditampilkan sebuah halaman chat atau obrolan untuk bisa saling berdiskusi antar NGO maupun dengan masyarakat.

Gambar 12
Fitur Forkum (Forum Komunikasi)

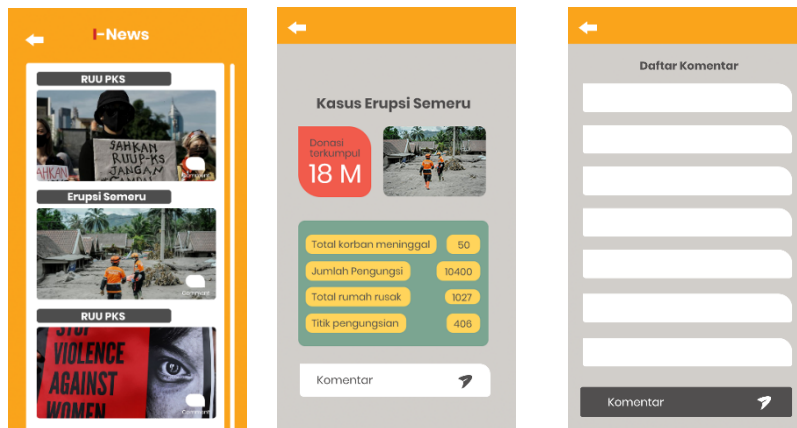


Sumber: Olahan penulis (2021)

Fitur I-News merupakan fitur yang menyajikan berita terkini di Indonesia yang mendapat sorotan publik. Fitur ini akan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat karena disajikan dalam bentuk infografis yang ringkas namun menarik. Fitur ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa harus membaca banyak kalimat yang kompleks. Selain itu, Fitur I-News ini akan menjadi jembatan di mana NGO akan mengambil peran terkait dengan isu yang sedang terjadi. Dalam fitur ini juga terdapat kolom untuk publik maupun pengelola berkomentar, dimana publik dan pengelola dapat memberikan pendapatnya terkait berita yang sedang terjadi. Dalam kolom komentar nama user akan dirahasiakan, namun jika komentar yang diberikan melanggar norma atau etika, maka admin secara langsung akan menghapus komentar tersebut.

Gambar 13

Fitur Forkum (Forum Komunikasi)



Sumber: Olahan penulis (2021)

Fitur klasterisasi isu merupakan sebuah fitur yang menyajikan klasifikasi isu agar user mudah memahami berita yang dibaca berdasarkan tema yang dipilih (pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, ataupun yang lainnya). Dalam klasterisasi isu sendiri terdapat deskripsi isu yang akan memberikan gambaran terkait isu yang bersangkutan. Kemudian, pada fitur ini akan ditampilkan pihak-pihak ataupun *stakeholders* yang berhubungan dengan isu terkait untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap isu tersebut.

Gambar 14

Fitur klasterisasi isu



Sumber: Olahan penulis (2021)

Edu-Space merupakan layanan pembelajaran bagi *user* untuk bisa mempelajari berbagai informasi terkait NGO. Fitur ini memberikan akses yang mudah dalam bentuk video dengan berbagai topik bahasan. Video ini berisi materi menarik oleh pemateri yang berkualitas dari NGO maupun *stakeholder* terkait. *Edu-space* memberikan ruang pemberdayaan bagi user untuk terbuka dalam informasi terkait NGO dan *stakeholder*

Gambar 15

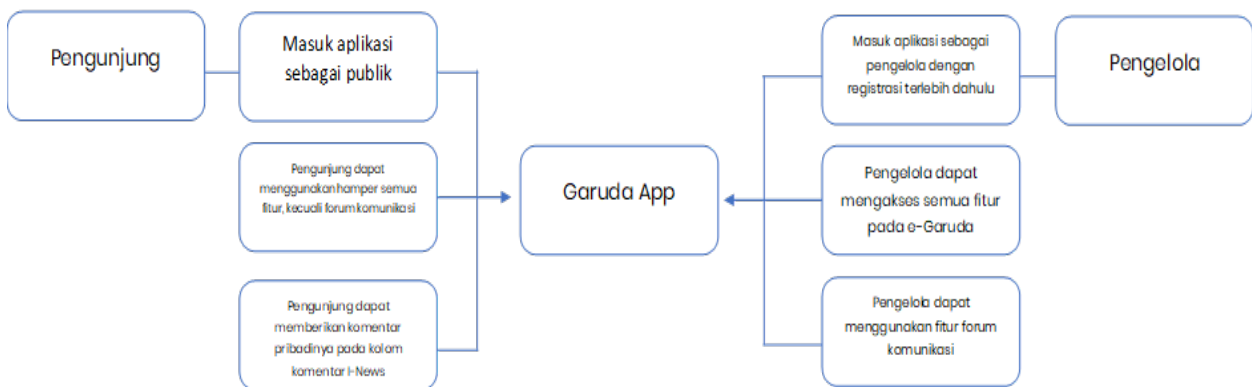
Fitur *Edu-Space*



Sumber: Olahan penulis (2021)

Gambar 16

Skema penggunaan aplikasi GARUDA



Sumber: Olahan penulis (2021)

GARUDA memungkinkan penggunaannya untuk masuk sebagai *public* dan pengelola. Sebagai *public user* hanya perlu login tanpa harus mendaftarkan diri. Sebagai *public user* dapat mengakses beberapa fitur. Namun *user public* tidak dapat menggunakan satu fitur khusus yakni forum komunikasi. *User public* dapat juga memberikan komentarnya dalam fitur I-News.

Selanjutnya terdapat *user* pengelola yang harus melewati tahap registrasi. Sebagai pengelola user diperlukan untuk registrasi dengan mencantumkan email, *password*, dan nama NGO atau *Stakeholder* terkait. Sebagai pengelola *user* dapat mengakses semua fitur, termasuk fitur forum komunikasi. Fitur ini memungkinkan NGO untuk berdiskusi dengan NGO lain.

Implikasi Nilai terhadap Inovasi GARUDA

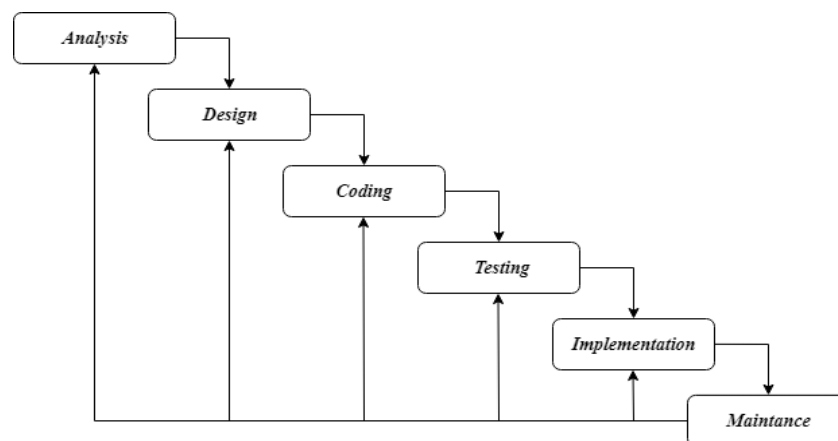
Manfaat yang didapatkan melalui implementasi platform GARUDA dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, yaitu untuk mendukung eksistensi dari Program *Smart City* di Kabupaten Lamongan. Melalui aplikasi GARUDA, pembangunan yang ada di wilayah Lamongan dapat terlaksana dengan efektif, cepat, dan efisien dengan bantuan kemajuan teknologi informasi. Hal ini juga didukung oleh langkah konkrit dari bupati Bupati Lamongan, yaitu Fadeli yang menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) yang menyatakan bahwa Lamongan siap untuk mengikuti Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang secara eksplisit menjelaskan bahwa Kabupaten Lamongan secara terbuka menerima terhadap inovasi yang membantu pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Kedua, yaitu untuk mendukung konsep demokrasi di Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai implikasi dari peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat. Kehadiran aplikasi GARUDA mempunyai tujuan yang berkesinambungan dengan ideologi demokrasi yaitu, memberikan ruang dan hak kepada masyarakat di wilayah Lamongan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan taraf hidup mereka disertai dukungan dari pihak pemerintah, LSM serta badan swasta sebagai wujud pelaksanaan *collaborative governance*. Ketiga, yaitu untuk meningkatkan rasa senasib dan sepenanggungan antar *stakeholder* terkait. Polemik yang terjadi di wilayah Lamongan tidak hanya semata-mata tanggungjawab dari pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait saja, namun juga masyarakat turut andil dalam menyelesaikan polemik tersebut. Dengan adanya inovasi GARUDA ini, masyarakat, pemerintah maupun *stakeholder* lainnya dapat bersinergi kolaboratif dalam menciptakan sebuah solusi sebagai hasil pemikiran bersama sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi dengan segera.

Tahapan Implementasi pada Inovasi GARUDA

Berikut ini merupakan lima tahapan dalam mengimplementasikan platform GARUDA dengan menggunakan metode *waterfall*

Gambar 17
Metode *waterfall*



Sumber: Olahan penulis (2021)

1. *Requirements Analysis*

Pada tahap ini, pengembang aplikasi perlu menghimpun berbagai informasi terkait kebutuhan software yang akan digunakan berdasarkan survei, wawancara, studi pustaka, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik studi pustaka yang diperoleh melalui jurnal-jurnal kredibel serta melakukan wawancara terhadap seorang *application developer* yang cukup kompeten pada bidangnya.

2. *Design*

Dalam tahap ini, pengembang aplikasi merancang dengan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk mendiskripsikan kebutuhan data dari suatu perangkat lunak yang sedang dibuat. Peneliti menggunakan kamus data, *flowmap*, diagram konteks, dan data *flow* diagram (DFD) untuk merancang sistem.

3. *Coding*

Tahap ini merupakan tahapan membuat sebuah aplikasi menggunakan kode-kode bahasa pemrograman tertentu. Pada tahap ini, peneliti menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Framework CodeIgniter.

4. *Testing*

Ketika tahap ini dilakukan, peneliti melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat. Dalam melakukan tahap *testing*, penulis menemukan beberapa kesalahan dalam melakukan interpretasi kode-kode bahasa pemrograman dan merombak *coding* hingga aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

5. *Implementation*

Pada tahap ini, peneliti bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* untuk mempublikasikan aplikasi ini ke masyarakat sebagai media branding agar manfaat keberadaan GARUDA dapat dirasakan oleh masyarakat Lamongan secara menyeluruh.

6. *Maintenance*

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari metode waterfall. Peneliti bekerja sama dengan *application developer* profesional untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap minggu dan bulan untuk meminimalisir adanya hambatan dari masyarakat dalam menggunakan aplikasi GARUDA.

Simpulan

GARUDA (Gerakan Membangun Nusantara) merupakan sebuah inovasi berupa platform yang bertujuan untuk mensinergikan pemerintah, masyarakat (LSM), dan pihak swasta dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika permasalahan yang semakin kompleks di wilayah Lamongan. Inovasi ini merupakan manifestasi konkrit dari konsep *collaborative governance* yang menekankan pada keterlibatan multisektor untuk mempercepat pembangunan sosial. Selain itu, kehadiran aplikasi GARUDA hadir untuk mengoptimalkan peran LSM di Lamongan yang selama ini dianggap ‘mati suri’ untuk ikut andil dalam pemberdayaan masyarakat serta dapat melaksanakan aspirasi masyarakat secara optimal.

Platform GARUDA nantinya akan ditunjang dengan beberapa *features* antara lain: 1) Klusterisasi Isu, 2) Edu Space, 3) Forum Komunikasi (Forkum), 4) Peta Persebaran LSM, 5) I-News. Dengan adanya keunggulan *features* tersebut, terobosan ini diharapkan mampu menjadi sebuah stimulus bagi masyarakat Lamongan dalam berpartisipasi aktif membantu *stakeholder* lainnya dalam membangun nusantara.

Referensi

- A.Lassa, J. (2020). *Jaringan LSM dan Masa Depan Keberlanjutan LSM di Indonesia*. Retrieved from <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/02/ksi-1580491935.pdf>
- Chris Ansell, A. G. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance* .
- ditjenppi.go.id. (2021). *Perubahan Iklim dan Indonesia Emas 2045, Seratus Tahun Indonesia Merdeka*. Retrieved from <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2835-perubahan-iklim-dan-indonesia-emas-2045,-seratus-tahun-indonesia-merdeka.html>
- ISMANA, A. (2014). Digital Citizenship . *The Turkish Online Journal of Educational Technology*.
- Karin Axelsson, U. M. (2010). Exploring the importance of citizen participation and involvement in e-government projects: Practice, incentives, and organization. *Transforming Government People Process and Policy* .
- katadata.com. (2017). *Pembangunan Teknologi Informasi Indonesia Tertinggal di Tingkat ASEAN* . Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/15/pembangunan-teknologi-informasi-indonesia-tertinggal-ditingkat-asean>
- katadata.com. (2021). *Indeks Pembangunan TIK Indonesia Naik Jadi 5,59 pada 2020* . Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/indeks-pembangunan-tik-indonesia-naik-jadi-559-pada-2020>
- kemendagri.com. (2021, 08 07). Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit.
- kemenkeu.go.id. (2020). *Ini Tantangan Ekonomi Menuju Indonesia Maju 2045*. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/11/12/180842683487835-ini-tantangan-ekonomi-menuju-indonesia-maju-2045>
- lamongankab.go.id. (2020). *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Sistem Pemerintahan* . Retrieved from <https://lamongankab.go.id/documents/bakesbang/PAPARAN%20SAKIP%20TRIBUNALAN%20IV.pdf>
- Ronasifah, F. (2019). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) CAKRAWALA KEADILAN DALAM PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Respon Publik*.
- Smeru.or.id. (2020). *NGO Database*. Retrieved from <https://smeru.or.id/en/content/ngo-database>
- Supriadi, M. (2020). *Peranan dari Partisipasi Masyarakat* . Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120657-T%2025573-Pemberdayaan%20Lembaga-Literatur.pdf>
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus Demografi di Indonesia . *Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* .
- tirto.id. (2017). *Tren Global Krisis Kepercayaan pada LSM* . Retrieved from <https://tirto.id/ada-tren-global-krisis-kepercayaan-terhadap-lsm-ckJr>